

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu proses terjadinya kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Tiga unsur yang harus ada dalam pembangunan yaitu: (1) Suatu proses, artinya merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus, (2) Peningkatan pendapatan per kapita penduduk, dan (3) Kenaikan pendapatan per kapita penduduk tersebut berlangsung terus-menerus dan dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai peningkatan produk nasional (GDP, GNP) yang disebabkan bukan saja oleh peningkatan kuantitas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi melainkan karena digunakan teknologi baru. Dengan faktor produksi yang sama, karena teknologi, bisa dihasilkan output yang lebih besar (Hudiyanto, 2017).

Jumlah penduduk adalah salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi di suatu Negara. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan mengurangi jumlah penduduk. Secara terus menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur (Silastri, 2017). Akan tetapi,

cepatnya pertumbuhan penduduk juga dapat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin menjauh. Apalagi jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering kali terjadi dinegara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kemiskinan merupakan keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan berdasarkan tingkat kemiskinan penduduknya. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, semakin rendah tingkat kemiskinan di Indonesia menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk di Indonesia (Dama, 2016). Menurut BPS (2018), garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori perkapita per hari yang diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi, umbi, daging, ikan, susu dan telur, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lain-lain). Masalah kemiskinan bukan hanya berpusat pada tingkat pendapatan yang rendah saja melainkan juga pada masalah pendidikan, perumahan, kesehatan, dan kondisi-kondisi sosial lainnya dari masyarakat.

Kemiskinan yang terjadi dapat dilihat sebagai keadaan dimana anggota masyarakat yang belum atau tidak ikut dalam proses perubahan karena tidak memiliki kemampuan yang didasarkan pada kemampuan dalam kepemilikan faktor-faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Masyarakat tidak ikut serta dalam pembangunan ini dikarenakan secara alamiah tidak atau belum mampu mengembangkan faktor produksinya, serta dapat pula terjadi secara tidak alamiah. Pemerintah yang merancang pembangunan sering kali tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi sehingga menyebabkan manfaat pembangunan tersebut tidak menjangkau mereka.

Masalah kemiskinan berkaitan mengenai pembangunan, mengingat istilah ini adalah dua sumbu yang tak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain (Irhamni, 2017). Pembangunan terpadu dan berkesinambungan merupakan hal yang harus dilakukan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing dengan objek sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka pendek dan jangka panjang (Saputra, 2011). Di Indonesia, pendidikan formal dan non-formal dalam jangka panjang dapat memberikan peran penting guna mengurangi kemiskinan. Hal itu dapat dilakukan secara langsung melalui pelatihan golongan masyarakat miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan

untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada saatnya pendapatan mereka akan meningkat. Adapun secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum.

Ikut campur pemerintah dalam memperbaiki kesehatan juga merupakan salah satu alat kebijakan yang penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Faktor-faktor utama yang mendasari kebijakan ini yaitu beban penderitaan yang berkurang secara langsung dapat memuaskan konsumsi kebutuhan pokok, perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin sehingga meningkatkan daya kerja, dan berkurangnya tingkat kematian bayi dan anak-anak secara tidak langsung juga berperan dalam mengurangi kemiskinan. Dengan maksud bahwa tingkat kematian yang rendah tidak saja membantu para orang tua untuk mencapai jumlah keluarga yang mereka inginkan, tetapi juga membantu mereka menginginkan keluarga yang lebih kecil.

Penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan baik. Berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2018 menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah 5,17%, turun sebesar 0,09% dibandingkan pada bulan September 2017 5,26%. Hal ini menyebabkan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Maret 2018 berada diperingkat ke-4 terbawah tingkat nasional. Akan tetapi, sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan dan tercapai perekonomian yang makin baik dari tahun ke tahun (Kemendagri, 2018).

**Tabel 1.1**

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2017  
(Orang)

<b>Tahun</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan dan Perdesaan</b>
2011	29625	118603	148228
2012	32977	117775	150752
2013	34113	106483	140596
2014	40779	105545	146324
2015	41323	106377	147700
2016	41069	102416	143485
2017	42845	96316	139161

*Sumber : BPS Kalimantan Tengah*

Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah masih terbilang besar. Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin desa dan kota dari tahun 2011 hingga tahun 2017 mengalami turun naik, seperti tahun 2011 sebesar 148.228 jiwa naik pada tahun 2012 menjadi 150.752 jiwa. Namun, di tahun 2013 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 140.596 jiwa. Mengalami kenaikan kembali menjadi 146.324 jiwa ditahun 2014 dan 147.700 jiwa ditahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan berturut-turut menjadi 143.485 dan 139.161 jiwa.

Adanya kenaikan harga-harga kebutuhan pangan menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia dari waktu ke waktu.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan salah satunya yaitu Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator pembangunan paling klasik dimana pertumbuhan PDRB yang tinggi dianggap sebagai indikator peningkatan kesejahteraan atau indikator ekonomi. Peningkatan pendapatan Produk Domestik Regional Bruto akan menurunkan persentase kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto, maka semakin tinggi tingkat pengeluaran dan permintaan agregat sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat akibat bertambahnya income yang diperoleh, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan persentase kemiskinan (Silastri, 2017).

Selain Produk Domestik Regional Bruto, ada faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dapat dikatakan bahwa UMK merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa diabaikan. Semakin tinggi upah minimum maka dapat mengurangi kemiskinan, dikarenakan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan dari pekerja sehingga dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan ketika pekerja tersebut termasuk dalam kategori miskin (Kurniawati dkk, 2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah Pengeluaran Perkapita. Pengeluaran Perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi per orang selama sebulan. Pengeluaran Perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan inflasi lebih rendah dari nominal pengeluaran rumah tangga. Semakin meningkatnya pengeluaran perkapita menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan (Finkayana dan Dewi, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin meneliti mengenai pengaruh faktor Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2017 (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota)”*.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi kemiskinan, maka penulis membatasi faktor-faktor tersebut dengan variabel dependen adalah Jumlah Penduduk Miskin, sedangkan untuk variabel independen adalah Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pengeluaran Perkapita. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data tahunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.



3. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi dan menambah ilmu pengetahuan serta menjadikan penulisan ini sebagai penyempurna kaidah-kaidah yang ada dan juga menjadi referensi dalam membuat karya ilmiah maupun penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hal yang telah diteliti, dan mampu memahami teori yang diterima di lapangan maupun di bangku perkuliahan.

- b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam pembuatan strategi kebijakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia.